

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kondisi ekonomi yang selalu mengalami perubahan telah mempengaruhi kegiatan dan kinerja perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar sehingga banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Kesehatan suatu perusahaan akan mencerminkan kemampuan dalam menjalankan usahanya, distribusi aset, keefektivitasan penggunaan aset, hasil usaha yang telah dicapai dan kewajiban yang harus dilunasi.

Investor sebagai pihak yang berada diluar perusahaan, investor dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang kebangkrutan sehingga keputusan yang diambil tidak akan salah. Salah satu indikator yang bisa dipakai untuk mengetahui tingkat kebangkrutan perusahaan adalah indikator keuangan. Kebanyakan penyebab kebangkrutan dimulai dari adanya kesulitan keuangan (Maihafni, 2016).

*Financial distress* dapat dialami oleh setiap perusahaan, baik perusahaan yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil karena faktor penyebab *financial distress* dapat berasal dari dalam (*internal*) maupun di luar (*external*) perusahaan. Pengelolaan suatu perusahaan ialah hal wajib yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Perusahaan harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaannya, karena dengan hal itu, kemungkinan perusahaan mengalami kondisi sehat akan semakin besar. Apabila suatu perusahaan gagal dalam mengatasi kesulitan keuangan dapat dikatakan bahwa perusahaan

tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang buruk. Kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik akan mendatangkan kesulitan bagi perusahaan, sebab perusahaan akan kehilangan pelanggan dan pemasok maupun kehilangan proyek baru karena manajemen hanya berkonsentrasi kepada penyelesaian kesulitan keuangan. Al-Khatib dan Al-Horani, (2012) mengatakan bahwa kebangkrutan perusahaan akan mengakibatkan berbagai kerugian baik bagi pemegang saham, karyawan dan perekonomian nasional. Bhunia *et al*, (2011) menyatakan bahwa adanya *financial distress* pada perusahaan dapat menyebabkan masalah yang dapat mengurangi efisiensi manajemen.

Indikasi terdapatnya perbedaan kepentingan antara pihak internal dan pihak eksternal dapat mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan laporan keuangan. Christiawan dan Tarigan, (2007) mengemukakan bahwa manajer akan mengambil suatu keputusan bisnis guna memaksimalkan sumber daya perusahaan, disisi yang berbeda pemegang saham sebagai pihak *principal* tidak mampu mengawasi semua keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan oleh manajer sebagai pihak *agent*. Satu kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak *agent* dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan yang dapat berakhir pada kesulitan keuangan atau *financial distress*. Tsun dan Yeh, (2002) menyebutkan bahwa *financial distress* dapat menyebabkan kebangkrutan, likuidasi atau perubahan signifikan dalam kontrol manajemen. *Financial distress* di penelitian ini diukur dengan model Altman Z-score. Faktor-faktor yang

mempengaruhi *financial distress* antara lain: *corporate governance* dan *intangible asset*.

Faktor Pertama, *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan Santoso, (2014) . Elemen-elemen yang digunakan pada tata kelola perusahaan ialah komisaris independen. Perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen yang semakin banyak akan membuat suatu perusahaan memiliki sistem pengelolaan yang semakin baik didalam perusahaan tersebut. Emiraldi (2007) menyebutkan bahwa jumlah yang semakin banyak dari komisaris independen di suatu perusahaan mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya *financial distress* dikarenakan semakin banyak pihak independen yang mengawasi manajemen perusahaan.

*Corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Yang ditekankan konsep *corporate governance* yaitu Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders* (Sulistyanto, 2003) . penelitian mengenai *corporate governance* yang dilakukan oleh (Niarachma, 2012), (Fadhilah, 2013) menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* namun berkebalikan

dengan penelitian (Kusanti, 2015) menyatakan bahwa *corporate governance* berparuh negative terhadap *financial distress*.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *corporate governance* yaitu: *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Kelima prinsip tersebut penting karna apabila *corporate governance* diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karna dapat mengurangi kemungkinan perekrayaan kinerja perusahaan. Dengan demikian, esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku Kaihatu, (2006) dalam (Fadhilah, 2013).

Penerapan *corporate governance* yang kurang baik dapat memperbesar peluang bagi pemegang saham pengendali untuk mentransfer kekayaan perusahaan ke dalam milik sendiri, karena kurangnya transparansi dalam penggunaan dana perusahaan, maka kemungkinan terjadi permasalahan keuangan (*financial distress*) pada perusahaan itu sendiri Johnson *et.al*, (2000) dalam (Bodroastuti, 2009).

Saat ini, permasalahan *corporate governance* menjadi fokus perhatian para *stakeholders* dalam lingkungan bisnis hampir di setiap pasar saham di seluruh dunia. *Stakeholders* merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada kinerja perusahaan. *Investor*, *kreditor*, *regulator*, *supplier*, dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang termasuk *stakeholder* perusahaan. Para *stakeholders* meningkatkan fokus pada pelaksanaan *corporate governance* dalam perusahaan untuk melindungi

kepentingan mereka. Investor memiliki kepentingan yang berkaitan dengan keputusan investasi sedangkan kreditor membutuhkan informasi untuk keputusan pemberian kredit bagi perusahaan. *Supplier* membutuhkan kepastian kelanjutan hubungan bisnis di masa depan dan masyarakat sebagai pihak yang memperoleh dampak operasi perusahaan. Dalam kenyataannya efektivitas pelaksanaan *corporate governance* yang rendah menjadi faktor penting yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan di Asia tahun 1997-1998 selain menurunnya kepercayaan diri investor Ho dan Wong, dalam (Li, *et al*, 2008).

Didalam lingkungan bisnis saat ini mengalami masalah *corporate governance* terus meningkat menjadi fokus utama bagi para *regulator*, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya diseluruh pasar keuangan dunia. Masalah *corporate governance* ini menjadi menarik perhatian karena di beberapa negara Asia yang terkena krisis *financial* (yang dimulai pada tahun 1997), banyak para ahli yang berpendapat bahwa kelemahan didalam *corporate governance* merupakan salah satu sumber utama kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara – negara tersebut pada tahun 1997 – 1998. Bahkan di Inggris pada akhir dasawarsa 1980an masalah *corporate governance* menjadi perhatian publik sebagai akibat publisitas masalah – masalah korporat seperti masalah *creative accounting*, kebangkrutan perusahaan dalam skala yang sangat besar, penyalahgunaan dana *stakeholders* oleh para manajer, terbatasnya peran auditor, tidak jelasnya kaitan antara kompensasi eksekutif dengan kinerja perusahaan, merger, akuisisi yang merugikan perekonomian secara keseluruhan Keasey dan Wright, (1997). Pada tahun

1999, negara – negara di Asia Timur yang sama-sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antar-negara, melainkan antar-perusahaan di negara-negara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang dan terpuruk, pulih atau terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada perusahaan masing-masing (Moeljono, 2006).

Di Indonesia, isu mengenai *corporate governance* telah muncul ke permukaan sejak pertengahan tahun 1997. Hal ini dikarenakan kurangnya *good corporate governance* yang oleh sebagian orang dituding sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi yang mempengaruhi ekonomi Indonesia sejak tahun 1997 Utama, (2003). Menurut Fajari, (2004) dalam tulisannya, krisis ekonomi ini terjadi karena beberapa faktor. Pengelolaan perusahaan kurang transparan sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah. Selain itu, konsentrasi pemegang saham terbesar dipegang oleh para beberapa keluarga sehingga menyebabkan sampur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan meninggalkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dan norma-norma *good corporate governance*. Perlindungan para pemegang saham minoritas dinilai sangat minim mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor, terutama investor asing, untuk tetap memegang saham-saham perusahaan publik di Indonesia. Stabilitas keamanan dalam negeri yang rendah dan tidak berfungsinya aparat penegak hukum menjadikan investasi jangka panjang yang ikut menggerakkan sektor riil mulai meninggalkan Indonesia dan memindahkan perusahaannya ke beberapa negara tetangga.

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance* dan *financial distress*. Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota perusahaan untuk menghindari terjadinya hubungan yang tidak sesuai tersebut maka dibutuhkan suatu konsep *good corporate governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* berdasarkan teori agensi, yaitu teori yang dapat menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalan akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kesepakatan.

Faktor kedua yang mempengaruhi *financial distress* yaitu melalui aset tetap tak berwujud atau *intangible assets*. Aset tetap tak berwujud sangat penting bagi suatu perusahaan karena sumber daya yang cerdas dan hak atas kekayaan intelektual menjadi aset yang lebih penting dari pada aset fisik ataupun aset finansial (Maihafni, 2016).

*Intangible assets* Rachmawati, (2011). Aset tetap tak berwujud atau *intangible asset* merupakan aset tetap yang secara fisik tidak dapat dilihat bentuknya, akan tetapi memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan. *Intangible asset* sulit dinilai untuk beberapa alasan. Pertama, *intangible assets* jarang diperdagangkan pada pasar eksternal. Kedua, *intangible assets* seringkali ditransfer dalam *tangible assets*. Ketiga, *intangible assets* terkadang sulit dideteksi. Beberapa kesulitan tersebut, para praktisi profesional mencoba untuk melacak aset nirwujud ini dengan proxy yang pasti seperti royalti, pembayaran lisensi (*licence fees*) dan deviden.

Pencatatan aset tak berwujud ini tidak berbeda dengan aset berwujud. *Intangible asset* dicatat sebagai *cost*. *Cost* dinilai termasuk seluruh biaya yang berhubungan dengan pembelian atau perolehan hak itu sehingga menjadi milik perusahaan. Jika aset ini diperoleh dengan menukarnya dengan aset lain bukan kas, maka dicatat menurut harga pasar yang wajar dari aset yang diserahkan atau harga pasar dari aset tak berwujud itu jika dianggap akurat (Rachmawati, 2011).

Aspek positif pada aset tidak berwujud yaitu, perkembangan nilai perusahaan dapat menghasilkan nilai pasar yang lebih besar melalui pendapatan perusahaan yang lebih tinggi Eberhart *et al*, (2004) dalam Rachmawati, (2011). Juga penelitian dari sudut pandang ekonomi, Breshi *et al*, (2000) dalam rachmawati, ( 2011 ) berpendapat bahwa berkonsentrasi industri dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada inovasi perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan industri yang bonafit cenderung memimpin dalam aplikasi paten.

*Intangible assets* memiliki kekuatan yang besar dalam dampaknya membawa arah perusahaan menuju kemajuan atau dapat pula menjadi subjek dari *financial distress* yang akan memicu terjadinya *banruptcy*. Apabila perusahaan memperkuat *intangible assets*, maka dalam hal ini perusahaan dapat memperkuat nilai perusahaan dimasa depan (*creating future opportunity*) dan menjauhkan nilai perusahaan dari *financial distress* dengan *value creating* (Rachmawati, 2011). penelitian mengenai aktiva tak berujud (*intangible asset*) yang dilakukan oleh (Maihafni, 2016) menyatakan bahwa aktiva tak berujud berpengaruh signifikan terhadap *financial*

*distress* namun berkebalikan dengan penelitian (Mahardhika,2017) menyatakan bahwa aktiva tak berujud berparuh negative terhadap *financial distress*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati, (2011) dengan menggunakan metode pengukuran Altman Z-score menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak memiliki *intangible assets* memiliki nilai Z-score yang lebih kecil dari pada perusahaan yang memiliki *intangible assets*. Sedangkan Wardani, (2006) meneliti tentang mekanisme *corporate governance* dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan . hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah direksi, jumlah komisaris, tingkat *turn over* dari direksi berpengaruh terhadap *financial distress* sedangkan independensi dewan komisaris dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan *Intangible Asset* Terhadap *Financial Distress* Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas serta dikaji adalah:

1. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Financial Distress*.
2. Apakah *Intangible assets* berpengaruh terhadap *Financial Distress*.
3. Apakah *Corporate Governance* dan *Intangible assets* berpengaruh terhadap *Financial Distress* secara simultan.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Financial Distress*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Intangible Assets* terhadap *Financial Distress*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* dan *Intangible Assets* terhadap *Financial Distress* secara simultan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain adalah:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan kerangka acuan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi dibidang sekuritas

dan juga sebagai sebuah prediksi kesehatan perusahaan berdasarkan altman Z-score dan *intangible assets* sebagai variabel bebasnya bagi manajemen perusahaan.

## 2. Bagi Manajemen Perusahaan

Bagi perusahaan, terutama perusahaan yang mengalami *financial distress*, dapat menjadi masukan mengenai *corporate governance* dan *intangible assets* yang berpengaruh untuk mengatasi kondisi financial distress tersebut.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang manajemen keuangan khususnya yang berhubungan dengan analisis pengaruh *corporate governance* dan *intangible assets* terhadap *financial distress*.

#### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Menjadi sumber referensi dan bukti empiris bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan atau penelitian yang berbeda pada bidang kajian yang sama.